

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai internalisasi norma lingkungan internasional melalui pendekatan *Green Politics* dalam pembangunan Green City oleh Pemerintah DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa permasalahan lingkungan yang dihadapi DKI Jakarta semakin kompleks dan mendesak untuk ditangani. Isu-isu seperti polusi udara, pencemaran air, penumpukan sampah, banjir, dan berkurangnya ruang terbuka hijau telah menimbulkan tekanan besar dari masyarakat, komunitas lingkungan, dan organisasi non-pemerintah kepada pemerintah daerah. Kondisi ini mendorong transformasi arah kebijakan pemerintah yang mengarah pada pembangunan kota yang berkelanjutan. Proses internalisasi norma lingkungan internasional dalam konteks pembangunan Green City di Jakarta dapat dianalisis melalui tiga tahapan utama dalam teori *Norm Life Cycle* oleh Finnemore dan Sikkink, yakni *norm emergence*, *norm cascade*, dan *norm internalization*. Pada tahap *norm emergence*, muncul kesadaran kolektif dari masyarakat sipil yang ditunjukkan dengan terbentuknya berbagai gerakan lingkungan seperti bank sampah, urban farming, komunitas sepeda, dan kampanye diet plastik. Tahap *norm cascade* ditandai dengan adopsi norma-norma global ke dalam kebijakan lokal melalui peraturan dan regulasi pemerintah, seperti Peraturan Gubernur tentang Bangunan Gedung Hijau dan

kebijakan pembatasan kendaraan bermotor. Sedangkan pada tahap *norm internalization*, norma-norma tersebut mulai tertanam dalam praktik kelembagaan dan kebijakan pemerintah yang berkelanjutan, seperti pengembangan transportasi ramah lingkungan dan pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Pendekatan *Green Politics* menjadi fondasi ideologis yang penting dalam proses ini. Pendekatan ini menempatkan keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat sebagai nilai utama dalam perumusan kebijakan. Para gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa, seperti Fauzi Bowo, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Anies Baswedan, berkontribusi dalam mendorong internalisasi nilai-nilai lingkungan melalui berbagai program dan kebijakan berbasis lingkungan.

Selain itu, proses internalisasi ini diperkuat oleh peran aktif aktor-aktor internasional seperti UNEP dan organisasi masyarakat sipil seperti WALHI yang menjembatani penerapan norma-norma global ke dalam konteks lokal Jakarta. Meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan, seperti keterbatasan kapasitas, tumpang tindih kewenangan, dan hambatan sosial-ekonomi, Pemerintah DKI Jakarta telah menunjukkan komitmen progresif dalam mengintegrasikan norma lingkungan ke dalam arah pembangunan kota. Dengan demikian, internalisasi norma lingkungan internasional melalui pendekatan *Green Politics* di DKI Jakarta menjadi refleksi nyata dari respons lokal terhadap tantangan global dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, dukungan masyarakat, serta sinergi

antara aktor lokal dan internasional dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan untuk mendukung keberhasilan internalisasi norma lingkungan dalam pembangunan Green City di DKI Jakarta. Pertama, pemerintah DKI Jakarta perlu memperkuat implementasi kebijakan lingkungan yang telah dirumuskan dengan memastikan adanya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Banyak kebijakan yang secara konsep sudah baik, namun dalam pelaksanaannya sering terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan penambahan alokasi anggaran menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Kedua, partisipasi masyarakat perlu terus didorong dan difasilitasi secara aktif. Proses internalisasi norma lingkungan tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan langsung dari masyarakat sebagai pelaku utama perubahan. Pemerintah daerah dapat memperkuat sinergi dengan komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta dalam menyelenggarakan program-program berbasis komunitas, seperti bank sampah, urban farming, kampung iklim, dan edukasi lingkungan sejak dini di sekolah. Ketiga, kerja sama dengan organisasi internasional dan jejaring kota-kota dunia yang telah berhasil menerapkan konsep Green City perlu diperluas. Melalui kolaborasi ini, DKI Jakarta dapat memperoleh

transfer teknologi, pengetahuan, serta dukungan teknis dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif terhadap tantangan lingkungan global. Keempat, pendekatan Green Politics harus diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam seluruh aspek pembangunan kota, termasuk transportasi, tata ruang, pendidikan, dan industri, agar nilai-nilai keberlanjutan, keadilan sosial kebijakan. Terakhir, disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam untuk mengevaluasi efektivitas dari kebijakan lingkungan yang telah diimplementasikan. Penelitian ini diharapkan dapat mengukur sejauh mana norma-norma lingkungan telah benar-benar terinternalisasi dalam perilaku masyarakat dan dalam sistem pemerintahan daerah, sehingga proses menuju Jakarta sebagai Green City tidak hanya menjadi retorika kebijakan, tetapi benar-benar, serta partisipasi masyarakat benar-benar menjadi pijakan utama dalam setiap proses perumusan ar terwujud dalam tindakan nyata yang berkelanjutan.